

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena penelitian ini bertujuan mencari gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Adapun pengertian metode deskriptif menurut Moch. Nazir (2005: 68) adalah sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:59). Adapun yang menjadi variabel tunggal dalam penelitian ini adalah keuangan daerah. Mengingat variabel dalam penelitian ini hanya satu, maka operasionalisasi variabel dalam penelitian ini mengarah pada proses meneliti satu variabel yakni keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Keuangan Daerah	Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Kemampuan keuangan daerah diukur dengan rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah mampu mandiri di bidang keuangan. - Daerah mampu meningkatkan PAD. - Daerah efektif dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan. 	Rasio

Sumber : Abdul Halim (2007:23)

3.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini ialah data APBD Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat dari tahun 2007 s.d. 2009. Adapun jumlah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota. Berikut daftar kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi unit analisis penelitian ini :

Tabel 3.2
Daftar Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat

No	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bandung Barat
3	Kabupaten Bekasi
4	Kabupaten Bogor
5	Kabupaten Ciamis
6	Kabupaten Cianjur
7	Kabupaten Cirebon
8	Kabupaten Garut
9	Kabupaten Indramayu
10	Kabupaten Karawang
11	Kabupaten Kuningan
12	Kabupaten Majalengka
13	Kabupaten Purwakarta
14	Kabupaten Subang
15	Kabupaten Sukabumi
16	Kabupaten Sumedang
17	Kabupaten Tasikmalaya
18	Kota Bandung
19	Kota Banjar
20	Kota Bekasi
21	Kota Bogor
22	Kota Cimahi
23	Kota Cirebon
24	Kota Depok
25	Kota Sukabumi
26	Kota Tasikmalaya

Sumber : www.jabarprov.go.id (data diolah, 2011)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

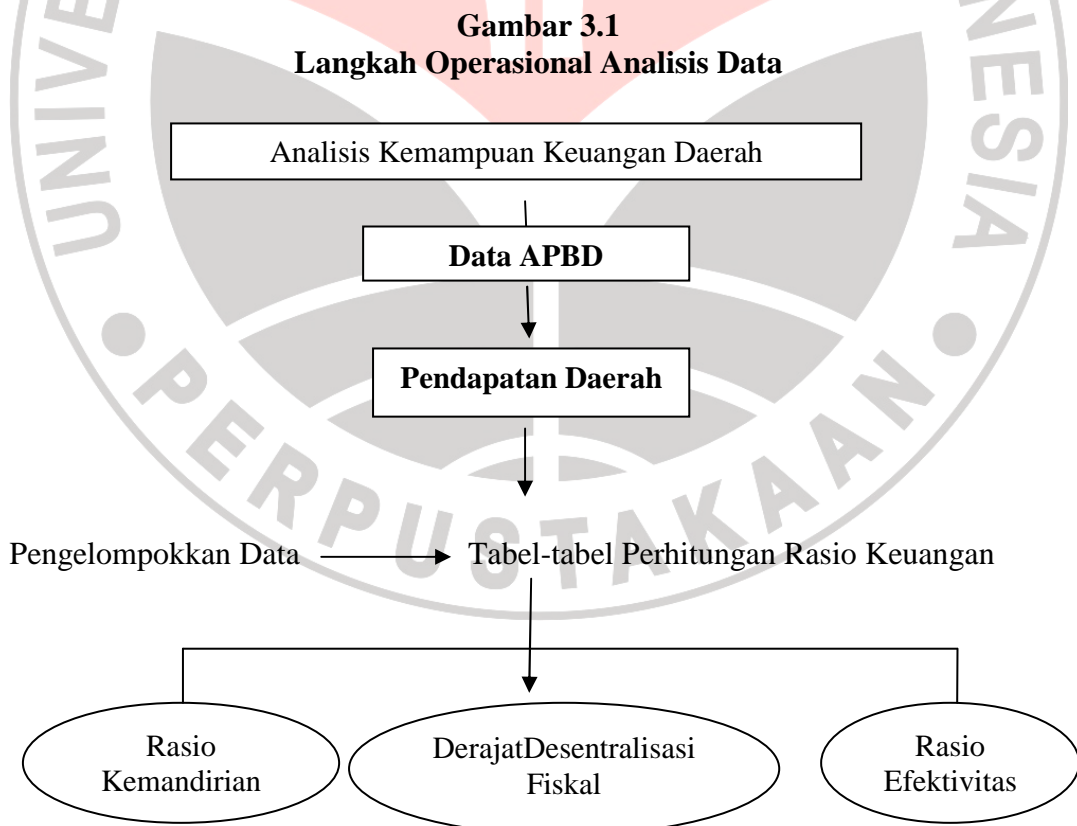
Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut yakni data runtut waktu (*time series*) berupa APBD kabupaten/kota se-Jawa Barat periode 2007 s.d 2009. Data diperoleh dari media internet melalui situs www.djpk.depkeu.go.id/, situs resmi pemda yang menerbitkan data APBD dan

laporan realisasi APBD Pemda yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Efektivitas. Ketiga analisis rasio ini seyogianya mampu memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai kemampuan keuangan daerah pada kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.

Teknik analisis data tersebut secara operasional digambarkan sebagai berikut :



Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah ini ialah sebagai berikut :

- 1) Mula-mula, data APBD yang telah diperoleh dikumpulkan untuk dilakukan langkah pengumpulan data mengenai pendapatan daerah yang terdapat dalam APBD 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Data tersebut kemudian dikumpulkan dalam satu tabel yakni tabel pendapatan daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk memudahkan perhitungan analisis data.
- 2) Setelah data mengenai pendapatan daerah dikelompokkan dalam satu tabel, kemudian dilakukan analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Untuk memudahkan proses analisis, akan dibuat tabel mengenai perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah sehingga dari tabel tersebut akan terlihat lebih jelas mengenai tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan dan pembangunannya. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian akan diberikan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan nilai yang diperoleh.
- 3) Setelah melakukan perhitungan terhadap rasio kemandirian, langkah selanjutnya ialah menghitung Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah. Dalam hal pun akan dilakukan pembuatan tabel perhitungan mengenai analisis tersebut untuk memudahkan perhitungan. Secara teknis, langkah yang dilakukan hampir sama

dengan poin dua (2) yang tentunya akan diakhiri dengan pemberian interpretasi data.

- 4) Analisis terakhir ialah menghitung rasio efektivitas keuangan daerah. Perhitungan juga dilakukan dengan mengelompokkan data dengan menggunakan tabel sehingga diketahui dengan jelas nilai dari rasio efektivitas keuangan daerah masing-masing Pemda.



